

**PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun oleh :

Ibnu Saputra
2010012111048

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

NO REG: 02/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg:02/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Ibnu Saputra

NPM : 2010012111048

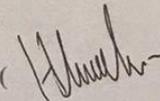
Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Helmi Chandra SY. S.H., M.H

(Pembimbing)

()

PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ibnu Saputra¹, Helmi Chandra Sy, S.H., M.H¹
¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email : ibnusaputra0702@gmail.com

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2026 concerning Protection and Empowering Fishermen, Fish Farmers and Salt Farmers, states that providing the infrastructure and facilities needed to develop a business, the Problem formulation in this research is 1) What is the role of the Fisheries and Food Service in Empowering Fishermen in Pesisir Selatan Regency? 2) What are the obstacles to the Fisheries and Food Service in Empowering Fishermen in Pesisir Selatan Regency? 3) What are the efforts of the Fisheries and Food Service to Empower Fishermen in Pesisir Selatan Regency? The research method uses sociological juridical legal methods. The data used are primary data and secondary data. The results of this research 1) the role of the fisheries and food service of Pesisir Selatan Regency in Empowering fishermen has not been running optimally, the fisheries and food service provides assistance, namely providing facilities and infrastructure for fishing communities such as junk boats, fishing equipment and outboard engines, the fisheries and food service providing counseling to fishermen groups such as providing counseling and mentoring. 2) the obstacles faced in empowering fishermen in Pesisir Selatan Regency are budget limitations and low human resources. 3) Efforts made to empower fishermen are: increasing the budget and increasing human resources.

Keywords:

Role,

Empowerment,

Fishermen.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan. Dalam Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di Bidang Perikanan.

Dalam hal ini Dinas Perikanan yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah dalam mengurus segala urusan perikanan harus mampu menjadi fasilitator yang dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi

pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat nelayan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 poin a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, menyatakan bahwa menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha.

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan dapat lebih ditingkatkan dan lebih diperhatikan lagi. Sehingga dengan peningkatan pemberdayaan nelayan tersebut dapat mengubah pola kehidupan masyarakat yang dulunya masyarakat kurang berdaya menjadi masyarakat yang berdaya, masyarakat yang

dulunya tidak sejahtera menjadi masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang mampu. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul : **“PERANAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa saja kendala/hambatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Bagaimana upaya Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peranan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Untuk menganalisa apa saja kendala Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?
3. Untuk menganalisa upaya Dinas Perikanan dan Pangan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari

sumber asli dengan cara yakni melakukan wawancara. Data sekunder yaitu data yang berkaitan erat dengan data primer yang berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara. Studi dokumen adalah peninjauan terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan sebagainya. Wawancara adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

D. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit, memilih nama yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pemberdayaan Nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Afirman Julta Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir. ”Peranan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk menyediakan bantuan produksi yang diperlukan oleh komunitas nelayan, seperti memberikan kontribusi pada sarana operasional, dan membina komunitas nelayan, peran Dinas Perikanan dan Pangan pada nelayan lebih jelas dengan memberdayakan masyarakat nelayan dengan membeli alat tangkap dan memberikan bantuan”

Bantuan yang di berikan sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana masyarakat nelayan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan bantuan sarana dan

prasarana kepada nelayan, sebagai berikut :

a. Perahu jukung

Jukung adalah perahu kayu dengan panjang 6-7 meter dan lebar sekitar 1 meter. Mereka dapat menggunakan layar atau motor tempel dan dapat langsung mendarat di pantai.

b. Pengadaan alat penangkapan ikan

Alat penangkapan Ikan adalah alat untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan di perairan untuk mengejar gerombolan ikan.

c. Pengadaan Mesin Tempel

Mesin penggerak perahu disebut mesin tempel ataupun kapal kecil dengan mesin penggerak, transmisi, dan propeller ataupun jet air. Mesin yang ditempelkan pada buritan perahu berfungsi sebagai penggerak dan menggerakkan perahu atau kapal dengan memutar mesin bersama propeller pada suatu sumbu.

2. Penyuluhan Kelompok Nelayan

a. Penyuluhan

penyuluhan merupakan cara untuk memberikan informasi kepada semua orang.

b. Pendampingan.

pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitor, dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

B. Kendala Yang Dihadapi Dinas Perikanan Dan Pangan Dalam Pemberdayaan Nelayan Di Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi kendala yang di alami, yaitu :

1. Terbatasnya dari segi anggaran

Rendahnya anggaran nelayan merupakan salah satu tantangan yang menghalangi pemberdayaan nelayan. Seorang nelayan yang menjadi informan peneliti menyatakan bahwa "bantuan yang diberikan dinas perikanan dan pangan tidak secara menyeluruh mengumpulkan semua nelayan, misalnya, dalam satu kelompok ada 30 orang dan bantuan yang diberikan hanya satu atau dua jika pendanaan dengan peningkatan bantuan untuk nelayan,

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia

Nelayan di Kabupaten Pesisir selatan memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah karena kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahkan ada yang belum tamat sekolah dan hanya belajar dari pengalaman mereka sendiri.

C. Upaya Dinas Perikanan dan Pangan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi kendala yang di alami, yaitu :

1. Meningkatkan Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2022 dengan jumlah anggaran yang dimiliki Rp. 4.358.417.458,- (empat Milyar tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah).- dan terdapat penambahan anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 688.100.270.- (Enam ratus delapan juta seratus ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).- dengan uraian penambahan pada sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil Rp. 688.100.270.- (Enam ratus delapan juta seratus ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).- dan pada sub kegiatan pelaksanaan fasilitas bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha sebesar

Rp. 14.740.000.- (empat belas juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah), sehingga total anggaran menjadi Rp. 5.061.267.728.- (lima milyar enam puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan nelayan di kabupaten pesisir selatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) TA 2023 dengan jumlah anggaran yang dimiliki Rp. 3.334.277.668,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah),- dan terdapat penambahan anggaran pada APBD-P sebesar Rp. 2.396.996.129,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah),- dengan uraian penambahan pada sub kegiatan pengembangan kapasitas nelayan kecil Rp. 2.396.996.129,- (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah),- sehingga total anggaran menjadi Rp. 5.731.273.922.- (lima milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah)

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Penyuluh perikanan harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang tinggi dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan tugas tersebut.

- a. Perahu jukung adalah perahu kayu dengan panjang 6-7 meter dan lebar sekitar 1 meter. Mereka dapat menggunakan layar atau motor tempel dan dapat langsung mendarat di pantai.
- b. Alat tangkap ikan adalah alat untuk melakukan penangkapan ikan dan udang. Alat penangkapan yang digunakan di perairan untuk mengejar gerombolan ikan.
- c. Mesin tempel adalah Mesin penggerak perahu disebut mesin tempel ataupun kapal kecil dengan mesin penggerak, transmisi, dan propeller ataupun jet air.

- B. Memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada kelompok nelayan.

Penyuluhan adalah penyuluhan merupakan cara untuk memberikan informasi kepada semua orang, sedangkan pendampingan adalah kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping yang berperan sebagai fasilitator, komunitas, dan dinamisator yang menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- a. Terbatasnya dari segi anggaran
Anggaran yang dimiliki Dinas Perikanan dan Pangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang mencukupi memenuhi seluruh kebutuhan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Rendahnya sumber daya manusia
Nelayan di Kabupaten Pesisir selatan memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah karena kebanyakan dari mereka memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Dinas Perikanan dan Pangan Dalam Pemberdayaan Nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan masih belum optimal. Bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan dan Pangan meliputi:
 - A. Memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana masyarakat nelayan seperti:

Menengah Pertama, bahkan ada yang belum tamat sekolah dan hanya belajar dari pengalaman mereka sendiri.

3. Upaya yang dilakukan dalam pemberdayaan nelayan yaitu :
 1. Meningkatkan anggaran Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan selalu meningkatkan anggaran di tiap tahun Seperti Anggaran 2022 dan 2023.
 2. Meningkatkan sumber daya manusia Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pembinaan, pembinaan yang dilakukan sebagai berikut :
 - Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Sektor Kelautan Dan Perikanan. Kegiatan pembinaan UMKM kelautan dan perikanan dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut :
 1. Mengidentifikasi dan menetapkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menjadi target pelaksanaan pembinaan izin Usaha Mikro dan Kecil;
 2. Melakukan bimbingan, konsultasi, bantuan teknis dan advokasi;
 3. Melaksanakan tugas pendampingan teknis dan kelembagaan usaha mikro dan kecil.

C. Saran

1. Dinas Perikanan dan Pangan diharapkan lebih memerhatikan nelayan dengan meningkatkan upaya pemberdayaan nelayan, Agar pemberdayaan nelayan berhasil.
2. Diharapkan kepada nelayan Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih berusaha mengembangkan kemampuannya dalam melaut agar hasil tangkapan lebih besar.
3. Meminta Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan anggaran untuk menyediakan bantuan alat tangkap canggih kepada nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

C. Sumber Lain

Helmi Chandra Sy, Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision. *Jurnal Rechts Vinding. Media Pembinaan Hukum Nasional*. 12. No. 1(2023): 127-143.

Winsyah, 2004, Deretan Kabupaten Paling Rendah di Provinsi Sumatera Barat, Nomor 1 Wilayahnya Ternyata Sangat Rendah dengan Garis Pantai Sepanjang 218 Kilometer. Diakses dari <https://www.harianhaluan.com>

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Helmi Chandra SY. S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dalam penelitian ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika, Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H, M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Dr. Desmal Fajri. S.Ag., M.H Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Para Pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.